

TINJAUAN YURIDIS PERANAN DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN KARO DALAM PENINGKATAN EKONOMI KELUARGA

Aprilda Sary Br Tarigan ¹⁾, Ansori Lubis ²⁾, Syawal Amry Siregar ³⁾

Universitas Darma Agung, Medan, Indonesia ^{1,2,3)}

Corresponding Author: aprildatarigan@gmail.com ¹⁾, ansoriboy67@gmail.com ²⁾,
Syawalsiregar59@gmail.com ³⁾

History:

Received : 11 November 2019

Revised : 12 Januari 2022

Accepted : 15 Februari 2022

Published: 10 Maret 2022

Publisher: Pascasarjana UDA

Licensed: This work is licensed under

Attribution-NonCommercial-No

Derivatives 4.0 International (CC BY-NC-ND 4.0)



Abstract

Indonesia has women who almost reach half of the total population, this is a great potential and must be utilized properly so that women are not oppressed. Empowerment of women is strategically important in increasing the role of women in increasing their potential to be more independent and work for the economy in their families. Services for women's empowerment and child protection are organized by the Karo Regency Women's Empowerment and Child Protection Office (DPPPA Karo Regency). The formulation of the research problem, how is the process to get women's empowerment in Karo Regency, how is the role of Karo Regency DPPPA in improving the family economy, how are the obstacles faced in implementing the role of Karo Regency DPPPA in improving the family economy. The specifications of this research are legal research that uses sociological juridical research, the approach method is the statutory method, the data analysis in this study is qualitative, the research location is in Karo Regency, the data collection method is carried out by interview techniques. Based on the results of research and discussion in this activity, it can be concluded that the process to obtain Women's Empowerment in Karo Regency has five stages, namely a. Preparation phase. b. Assessment stage, in which there is a process of identifying/analyzing needs and problems c. The planning stage of alternative programs or activities, d. Stage of program or activity implementation, e. Evaluation stage. The roles of the Karo Regency Women's Empowerment and Child Protection Service in improving the family economy are: a. DPPPA Karo Regency motivates women, b. The DPPPA of Karo Regency created a program of training activities for women's empowerment. C. DPPPA Karo Regency helps to obtain commercial capital, d. The DPPPA of Karo Regency helps promote access to work for women. The constraint factors faced in implementing the role of the Karo Regency DPPPA in improving the family economy are that women participating in women's empowerment training by the Karo Regency DPPPA tend to lack confidence, lack support from their husbands, make less use of training programs, and have little access to work for women.

Keywords: women empowerment, family economic improvement, DPPPA Karo

Abstrak

Indonesia memiliki jumlah kaum perempuan yang hampir mencapai setengah dari total penduduknya, hal ini merupakan potensi yang besar dan harus dimanfaatkan dengan baik agar kaum perempuan tidak tertindas. Pemberdayaan perempuan menjadi strategis yang sangat penting pada peningkatan peran perempuan dalam menambah potensi pada dirinya sehingga lebih mandiri serta berkarya untuk peningkatan ekonomi pada keluarganya tersebut. pelayanan terhadap pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dilakukan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Kabupaten Karo (DPPPA Kabupaten Karo). Rumusan masalah penelitian ini, bagaimana proses untuk mendapatkan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo, bagaimana peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga, bagaimana faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga. Spesifikasi penelitian ini adalah penelitian hukum dengan menggunakan jenis penelitian yuridis sosiologi, metode pendekatannya yaitu metode perundang-undangan, analisis data dalam penelitian ini secara kualitatif, lokasi penelitian di Kabupaten Karo, teknik wawancara merupakan metode pengumpulan data yang di gunakan dalam penelitian ini. Berdasarkan hasil pembahasan penelitian pada kegiatan ini, maka dapat disimpulkan bahwa proses untuk mendapatkan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Karo ada lima tahapan yaitu a. Tahap persiapan. b. Tahap

Assesment, didalamnya terdapat proses mengidentifikasi/analisis kebutuhan dan permasalahan c. Tahap perencanaan alternatif program/ kegiatan, d. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan, e. Tahap evaluasi. Peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga yaitu: a. DPPPA Kabupaten Karo memotivasi kaum perempuan, b. DPPPA Kabupaten Karo membuat program kegiatan pelatihan pemberdayaan Perempuan. c. DPPPA Kabupaten Karo membantu akses modal usaha, d. DPPPA Kabupaten Karo membantu memudahkan akses kerja kepada perempuan. Faktor kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan peranan DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga yaitu Kurangnya kesadaran dan rasa percaya diri perempuan, minimnya dukungan/suport dari suaminya, kurang memanfaatkan program pelatihan, dan sedikitnya akses kerja bagi perempuan.

Kata Kunci: Pemberdayaan perempuan, peningkatan ekonomi keluarga, DPPPA Kabupaten Karo

PENDAHULUAN

Menurut Priyono dan Pranaka pemberdayaan perempuan itu merupakan proses kesadaran dalam pembentukan kapasitas (*capacity building*) terhadap partisipasinya (perempuan) yang lebih ekstra dan besar, serta kekuasaan dan pengawasan pembuatan keputusan yang lebih banyak dan tindakan transformasi agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Pemberdayaan perempuan menjadi strategi penting dalam meningkatkan peran perempuan dalam meningkatkan potensi diri agar lebih mampu mandiri dan berkarya. Hal ini didasarkan pada satu pokok pikiran mengenai perlunya kemandirian bagi kaum perempuan, supaya pembangunan dapat dirasakan oleh semua pihak. Pemberdayaan ini menjadi penting karena dapat menciptakan kondisi/suasana yang membuat potensi masyarakat untuk dapat berkembang baik dalam perekonomian, sosial, budaya dan lainnya, untuk mencapai tujuan pemberdayaan dapat dilakukan dengan berbagai macam strategi, yaitu strategi modernisasi yang mengarah pada perubahan struktur sosial, ekonomi dan budaya yang bersumber dari peran serta masyarakat. Perempuan sebagai bagian dari masyarakat diharapkan mampu

menolong dirinya sendiri dalam berbagai hal dan berbagai situasi, terutama yang menyangkut pada kelangsungan hidupnya. Namun kondisi perempuan saat ini secara umum adalah rendahnya pengetahuan, keterampilan, sikap kreatif dan aspirasi yang mengakibatkan banyak perempuan hidup dalam kemiskinan dan termarginalkan dalam lingkungannya. Oleh karena itu perempuan perlu diberdayakan terutama yang paling penting didalam bidang ekonomi untuk mengatasi kemiskinan agar ekonominya meningkat dan penghasilan perempuan dapat bertambah dengan melakukan pemberdayaan dalam bidang ekonomi, contohnya seperti bantuan modal usaha, bantuan simpan pinjam, membuat koperasi, pelatihan penambahan keterampilan bagi perempuan-perempuan, dan lain sebagainya.

Pelayanan terhadap urusan perempuan dan anak di daerah Kabupaten Karo diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kabupaten Karo, yang diatur dalam Perbup No. 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo. Tugas pokok DPPPA sesuai pasal 223 ayat (3) adalah membantu Bupati

melaksanakan urusan pemerintahan bidang-bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah. Adapun bidang-bidang yang mengurus pelayanan perempuan dan anak di Kabupaten Karo adalah bidang kelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan, bidang pelayanan perempuan dan anak. Tetapi menurut pengamatan penulis bahwa dinas tersebut belum sepenuhnya dapat memberikan pelayanan yang maksimum untuk memberdayakan perempuan. Hal ini terlihat dari masih kurangnya keterlibatan perempuan di bidang ekonomi dan politik, dimana perempuan masih lebih dominan terlibat di bidang sosial saja. Oleh karena itu penulis melakukan penelitian dengan judul, "Tinjauan Yuridis Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo Dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga".

Perumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang sehingga rumusan masalahnya adalah:

1. Bagaimana proses untuk mendapatkan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo ?
2. Bagaimana peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga ?
3. Bagaimana faktor Penghambat yang dihadapi pada pelaksanaan peranan Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak di Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga ?

Pengertian peran adalah suatu perilaku yang diharapkan dari seseorang berdasarkan posisi sosial baik secara formal maupun informal. Dalam hal ini adalah peran dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) terkait tugas, fungsi dan program DPPPA. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo adalah salah satu lembaga di Kabupaten Karo yang menjalankan Peraturan Bupati Karo No. 39 Tahun 2016 Tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Dinas Daerah Kabupaten Karo. Pemberdayaan perempuan merupakan suatu proses kesadaran/pembentukan kapasitas (*capacity building*) yang bertujuan agar menghasilkan persamaan derajat yang lebih besar antara perempuan dan laki-laki. Ekonomi keluarga merupakan ekonomi yang dikembangkan dan diusahakan oleh suatu keluarga dengan upaya menumbuhkan minat dan motifasi dibidang usaha dan tenaga terampil.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah memakai penelitian yuridis sosiologis (penelitian lapangan). Sifat penelitian ini adalah penelitian deskriptif (bertujuan untuk dapat menggambarkan secara tepat sifat-sifat suatu individu, keadaan seseorang, gejala yang ada pada seseorang atau suatu kelompok. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini adalah data primer dan

data sekunder. Data primer (data yang diperoleh secara langsung dari penelitian lapangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti, yakni dilakukan pengamatan). Data sekunder (data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan).

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan pustaka dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dilakukan dengan menelaah ketentuan perundang-undangan yang berlaku dalam kasus tersebut. Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, dengan menjadikan Kabupaten Karo sebagai objek penelitiannya.

Pengumpulan data lapangan akan dilakukan dengan teknik wawancara, yakni wawancara mendalam (*indepth interview*), Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap. Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisis data digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik deskriptif non statistik. Metode ini digunakan untuk data non angka maka analisis yang digunakan juga analisis non statistik dengan menggunakan metode induktif, yaitu cara berpikir yang

bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum. Dan metode deduktif, yaitu cara berpikir yang berangkat dari masalah-masalah yang umum kemudian untuk menilai peristiwa-peristiwa yang khusus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil yang telah diperoleh berdasarkan penelitian yaitu:

Proses untuk Mendapatkan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Karo

Pemberdayaan merupakan suatu proses yang dilakukan kepada masyarakat dengan tujuan agar masyarakat menjadi berdaya, dan tujuannya juga untuk mendorong serta memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan keterampilan/keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya. Melakukan pemberdayaan perlu tiga langkah yang berkesinambungan, yaitu pemihakan, penyiapan, dan perlindungan.

Kesadaran terhadap pengertian peran perempuan mulai berkembang yang diwujudkan dalam pendekatan program perempuan dalam pembangunan dan peningkatan ekonomi dalam keluarga. Semua itu didasarkan pada satu pemikiran mengenai pentingnya perempuan yang mandiri, karena perempuan merupakan sumber daya manusia yang sangat berharga sehingga posisinya diikutsertakan dalam setiap pembangunan.

Tujuan dari program pemberdayaan perempuan adalah meningkatkan kemampuan kaum

perempuan agar terlibat dalam program pembangunan baik dalam daerah maupun nasional, sebagai partisipasi aktif (subjek), meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam kepemimpinan, meningkatkan kemampuan kaum perempuan dalam mengelola usaha skala rumah tangga atau industri kecil maupun industri besar untuk menunjang ekonomi keluarga, meningkatkan peran dan fungsi organisasi perempuan di tingkat lokal maupun non-lokal.

Pemberdayaan kaum perempuan lebih banyak ditekankan pada bidang ekonomi, khususnya kondisi sekarang ini yang ada di Kabupaten Karo Kemiskinan masih menjadi salah satu pemicu terkuat bagi kaum perempuan, ditambah lagi pendidikannya yang sangat minim karena keterbatasan biaya. Pada saat ini dalam mensosialisasikan wacana gender pada Kabupaten Karo saat ini memang sulit karena harus berhadapan dengan konsep budaya patriarkis yang telah tertanam dalam kebiasaan budayanya sehingga rentan akan praktek diskriminatif terhadap perempuan. Akan tetapi dengan adanya pendekatan sosio-kultural serta sosialisasi wacana gender yang terus disosialisasikan secara terus menerus dan karena tidak bertentangan dengan agama, maka akan merubah secara pelan-pelan terhadap pemikiran dan pandangan terhadap peran perempuan dalam pembangunan yang akan bisa mengimbangi konsep budaya patriarkis yang mendominasi peran dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan. Dan pada akhirnya timbul harmonisasi hubungan antara

laki-laki dan perempuan, serta hidup rukun tanpa adanya kesenjangan gender di dalam lingkungan hidupnya masing-masing. Adanya DPPPA Kabupaten Karo merupakan bentuk kepedulian pemerintah terhadap perempuan Kabupaten Karo yang berdaya. Dilihat dari visinya "Terwujudnya kesetaraan gender dan keadilan gender, pemberdayaan perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak", maka selayaknya, harus menjalankan program sebaik-baiknya dan bisa menyentuh mayoritas perempuan Tanah Karo. Keberadaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo ini harus dioptimalkan dan tentu saja tidak menafikan beberapa program yang telah berjalan saat ini. Semoga perempuan Tanah Karo semakin maju dan terberdayakan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo merupakan salah satu instansi pemerintah yang mempunyai tugas dan tanggung jawab dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo.

Proses untuk mendapatkan pemberdayaan perempuan di Kabupaten khususnya yang dilakukan oleh DPPPA Kabupaten Karo adalah ada lima tahapan program pemberdayaan perempuan yaitu :

1. Tahap Persiapan, tahap ini didalamnya terdapat tahapan persiapan awal, petugas, dan persiapan lapangan. Tahapan persiapan merupakan suatu tahapan yang paling terdahulu yang harus dilakukan, seperti pengumpulan program kegiatan dan ide-ide inovasi

- baru dalam kegiatan yang akan dilakukan untuk pemberdayaan Perempuan khususnya untuk meningkatkan ekonomi keluarga serta menunjang tingkat kreatifitas perempuan. Persiapan petugas (dalam hal ini tenaga *community worker*) merupakan penentuan anggota dari DPPPA Kabupaten Karo yang akan melaksanakan program kegiatan yang telah disusun tersebut. Biasanya anggota DPPPA Kabupaten Karo yang bertugas dalam pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan perempuan adalah Bidang Pemberdayaan Perempuan dan dibantu dengan anggota DPPPA Kabupaten Karo lainnya. Sementara itu pada persiapan lapangan petugas akan melakukan penyiapan lapangan, pada awalnya dilakukan studi kelayakan terhadap daerah/lokasi dan peserta yang akan dijadikan sasaran, baik dilakukan secara informal maupun dilakukan secara formal.
2. Tahap Assesment. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis masalah ataupun kebutuhan yang diekspresikan dan juga sumber daya yang dimiliki komunitas sasaran.
 3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan. Tahap ini merupakan tahapan penentuan atau pemilihan program kegiatan yang telah dikumpulkan dalam tahapan persiapan awal tersebut. Setelah program penunjang pemberdayaan perempuan terpilih maka akan dilakukan penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA), penentuan narasumber untuk kegiatan tersebut, dan penyusunan dokumen lainnya yang menunjang pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut.
 4. Tahap Pelaksanaan program atau kegiatan, tahapan ini merupakan salah satu tahapan yang paling penting (krusial) dalam proses pemberdayaan perempuan. Hal ini dilaksanakan untuk mencapai tujuan yaitu pemberdayaan perempuan khususnya dalam peningkatan perekonomian keluarga masyarakat Kabupaten Karo.
 5. Tahap Evaluasi, tahapan evaluasi ini merupakan tahapan penilaian apakah program kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut sudah berjalan dengan baik dan apakah bermanfaat bagi perempuan yang telah diberdayakan tersebut atau tidak. Tahapan ini juga terdapat kegiatan peninjauan serta pengawasan intensif dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan oleh masyarakat tersebut sehingga diharapkan akan dapat membentuk suatu sistem masyarakat terkhususnya bagi perempuan yang diberdayakan lebih "mandiri" dengan

memanfaatkan sumber daya dan keterampilan hasil kegiatan yang telah dilakukan tersebut.

Pelaksanaan proses ini bertujuan untuk pencapaian pemberdayaan perempuan. Agar perempuan di Kabupaten Karo yang melaksanakan dan mendapatkan program kegiatan pemberdayaan perempuan tersebut mendapatkan ilmu dan keterampilan, serta menjadikan keterampilan tersebut menghasilkan suatu karya yang dapat meningkatkan perekonomian keluarganya masing-masing khususnya di Kabupaten Karo ini.

Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo dalam Peningkatan Ekonomi Keluarga

DPPPA Kabupaten Karo mempunyai fungsi, dan fungsinya adalah sebagai perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya di wilayah Kabupaten Karo, pelaksana kebijakan tersebut dilakukan sesuai dengan lingkup tupoksi dan tugasnya, melaksanakan dalam hal evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya, melaksanakan administrasi dinas sesuai dengan tupoksi dan lingkup tugasnya, serta melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati Kabupaten Karo terkait dengan tugas dan fungsinya.

Keluarga merupakan pelaku ekonomi karena didalam keluarga terdapat kegiatan konsumen maupun produsen dimana kegiatan tersebut merupakan kegiatan perekonomian. Ekonomi keluarga merupakan segala sesuatu kegiatan perekonomian yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan keluarga, baik untuk

memenuhi kebutuhan primer maupun skunder.

Sesuai dengan salah satu visi DPPPA Kabupaten Karo yaitu Pemberdayaan Perempuan. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo yang selanjutnya disingkat dengan DPPPA memiliki peran penting dan tugas utama untuk memperdayakan perempuan agar lebih mampu memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap ekonomi keluarga, sehingga diharapkan keluarga menjadi lebih sejahtera serta lebih dihargai dalam hubungan sosial. Tetapi perempuan di Kabupaten Karo masih tergolong kurang diberdayakan, sehingga kontribusinya terhadap ekonomi keluarga masih kurang dirasakan oleh masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa upaya yang dilakukan DPPPA Kabupaten Karo dalam pemberdayaan Perempuan sebagai pemegang peran penting dalam pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo adalah memotivasi kaum perempuan, menyediakan pelatihan, memudahkan akses lapangan usaha atau lapangan kerja, memudahkan akses ke bidang politik, yang disertai dengan evaluasi terhadap tingkat keberhasilan program pemberdayaan perempuan.

DPPPA Kabupaten Karo mempunyai faktor penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan pemberdayaan perempuan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga, pelaksanaan pemberdayaan perempuan oleh DPPPA Kabupaten Karo belum sepenuhnya dapat memberdayakan perempuan untuk

meningkatkan ekonomi keluarga, hal ini dapat dilihat dari masih banyaknya keluarga miskin dan minimnya ilmu pengetahuan khususnya pada perempuan di daerah Kabupaten Karo, padahal kaum perempuannya masih tergolong kurang produktif, karena perempuan masih memiliki banyak waktu yang terbuang begitu saja, padahal seharusnya dapat dimanfaatkan secara lebih produktif. Hal ini disebabkan DPPPA Kabupaten Karo menghadapi berbagai faktor penghambat dalam pemberdayaan perempuan, yaitu kurangnya kesadaran dan rasa percaya diri perempuan, perempuan peserta program pemberdayaan oleh DPPPA Kabupaten Karo kurang mendapatkan dukungan dari suami, perempuan peserta program pemberdayaan oleh DPPPA Kabupaten Karo kurang memanfaatkan program pelatihan, sedikitnya akses kerja bagi perempuan, serta beban dan peran ganda perempuan.

SIMPULAN

Simpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari Bab I, Bab II, Bab III dan Bab IV maka dapat ditarik kesimpulan dan saran pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Proses untuk mendapatkan Pemberdayaan Perempuan di Kabupaten Karo ada lima tahapan yaitu: a. Tahap persiapan dimana di dalamnya ada bepepa persiapan yaitu persiapan awal, persiapan petugas, dan persiapan lapangan. b. Tahap Assesment, didalamnya terdapat proses mengidentifikasi/analisis kebutuhan dan permasalahan yang

dimiliki sasaran tersebut. c. Tahap perencanaan alternatif program/kegiatan, yang di dalamnya terdapat proses penentuan/pemilihan program yang akan dijalankan, penyusunan rencana kerja anggaran, dan persiapan dokumen berkas-berkas lainnya yang diperlukan. d. Tahap pelaksanaan program atau kegiatan, tahapan ini merupakan tahapan paling penting untuk mengembangkan pemberdayaan perempuan dalam peningkatan ekonomi keluarga di Kabupaten Karo. e. Tahap evaluasi, tahapan ini merupakan tahapan penilaian dan pengawasan serta peninjauan secara intensif dari hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

2. Peranan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga yaitu: a. DPPPA Kabupaten Karo memotivasi kaum perempuan, motivasi diberikan bagi kaum perempuan yang datang pada pelaksanaan program kegiatan pemberdayaan perempuan maupun bagi kaum perempuan yang langsung datang ke ruang PUSPAGA yang telah disediakan oleh DPPPA Kabupaten Karo. b. DPPPA Kabupaten Karo membuat program kegiatan pelatihan pemberdayaan Perempuan. c. DPPPA Kabupaten karo membantu akses modal usaha. d. DPPPA Kabupaten Karo membantu memudahkan akses kerja kepada perempuan.
3. Faktor Penghambat yang dihadapi dalam pelaksanaan peranan

DPPPA Kabupaten Karo dalam peningkatan ekonomi keluarga yaitu kurangnya kesadaran dan rasa percaya diri perempuan, kurang mendapat dukungan dari suaminya, kurang memanfaatkan program pelatihan, sedikitnya akses kerja bagi perempuan, dan beban dan peran ganda perempuan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disebutkan maka saran penulis sebagai berikut:

1. Proses untuk mendapatkan pemberdayaan perempuan di Kabupaten Karo sudah baik, namun masih perlu lakukan ekstra pada pelaksanaan identifikasi, analisis kebutuhan dan permasalahan yang di miliki perempuan Kabupaten Karo, supaya program kegiatan yang dilaksanakan DPPPA sesuai dengan kebutuhan dan pelaksanaannya merata ke seluruh daerah di Kabupaten Karo.
2. Peran DPPPA Kabupaten Karo dalam pemberdayaan perempuan untuk meningkatkan ekonomi keluarga sudah bagus, namun DPPPA Kabupaten Karo perlu peningkatan dan penambahan program kegiatan pelatihan yang membangun *skill* perempuan yang lebih baik, serta menyesuaikan dengan kebutuhan *Skill trend* zaman sekarang, seperti pelatihan penggunaan teknologi informasi untuk pengembangan usaha bagi perempuan supaya dapat melancarkan usaha mereka dalam meningkatkan ekonomi keluarganya.
3. DPPPA Kabupaten Karo perlu pelaksanaan ekstra untuk memotivasi para kaum perempuan di Kabupaten Karo sehingga mendapatkan kepercayaan diri yang kuat serta keberanian dalam melaksanakan pelatihan demi membangun *skill* mereka. DPPPA Kabupaten Karo sebaiknya meningkatkan dan memperluas lagi jaringan kerja sama terhadap mitra kerja bagi instansi Pemerintah maupun swasta untuk menanggulangi faktor pembahambat perempuan yang telah terlatih untuk mendapatkan lapangan pekerjaan, sehingga mereka bisa meningkatkan perekonomian keluarganya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2013.
- BKKBN Konovoil, *Pedoman Bidang Usaha dan Tenaga Melalui elompok UPPKS*, Lampung, 1999.
- Nugroho, Riant, *Gender dan Strategi Pengarus-Utamanya Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2014.
- Prijono, Onny S., *Pemberdayaan, Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, Centre for Strategic, CSIS, Jakarta, 2012.
- dan Ranarka, A.M.W., *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*, CSIS, Jakarta, 2016.

Jurnal:

Harayanto, Sugeng, *Peran Aktif Dalam Meningkatkan Pendapatan Rumah Tangga Miskin, Study Kasus pada Wanita Pemecah Batu di Kecamatan Tugu Tenggelek, Jurnal Ekonomi Pembangunan.*